

# Polisi Wanita (Polwan): Reformasi Kesetaraan Gender Dalam Tubuh Polri

Edi Saputra Hasibuan

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [edi.hasibuan@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:edi.hasibuan@dsn.ubharajaya.ac.id)

## Article info

Received: Feb 25, 2022

Revised: Mar 20, 2022

Accepted: Mar 29, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1050>

**Keywords :** *Gender Equality, Polwan, Reformation*

**Abstract :** *As a state institution that has the authority to enforce law, the National Police must of course have a very dynamic nature, the presence of a member of the Police must be able to have a great effect on the community. Of course this is viewed from various aspects, both the Police as protectors, protectors, and servants of the community. This paper highlights the presence of female police officers (Polwan) which in fact is an important part of the progress of this institution itself. The fact that the Polri profession is a profession that requires strong mentality, determination, and dedication is not only found in men, but women are also able to become important figures who have a major influence on the development of the Polri itself. On this occasion the author tries to explore a little about gender equality, especially the existence of policewomen in the police, that to become public servants not only men, but women also have their role and existence in society. The issue of gender equality itself has always been a hot topic that is interesting to talk about, this cannot be separated from the dichotomy between men and women.*

**Kata kunci :** Kesetaraan Gender, Polwan, Reformasi

**Abstrak :** Sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam penegakkan hukum Polri tentu harus memiliki sifat yang sangat dinamis, keberadaan dari sosok anggota Polri harus mampu memberikan efek yang besar kepada masyarakat. Tentu hal ini ditinjau dari berbagai macam aspek, baik Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan warga masyarakat. Tulisan ini menyoroti tentang kehadiran Polisi Wanita (Polwan) yang nyatanya merupakan bagian penting dari kemajuan institusi ini sendiri. Kenyataan bahwa profesi Polri adalah profesi yang membutuhkan mental, tekad, dan pengabdian yang kuat ternyata tidak hanya ditemui pada seorang pria, namun wanita pun mampu untuk menjadi sosok penting yang memberikan pengaruh besar terhadap reformasi Polri itu sendiri. Pada kesempatan kali ini penulis mencoba untuk sedikit mengupas mengenai kesetaraan gender, khususnya keberadaan Polwan di tubuh Polri, bahwa untuk menjadi pelayan publik bukan hanya laki-laki saja, namun wanita juga memiliki peran dan eksistensi mereka terhadap masyarakat. Isu mengenai kesetaraan gender sendiri selalu menjadi topik hangat yang menarik untuk dibicarakan, hal ini tidak lepas oleh karena adanya dikotomi antara pria dan wanita.

## I. PENDAHULUAN

Bicara mengenai perempuan atau wanita rasanya bisa disepakati bahwa mereka memiliki sifat yang lembut dan lebih sabar dari pria, stigma dalam masyarakat seringkali memandang bahwa wanita adalah makhluk yang lemah dan butuh perlindungan dari seorang pria, jika ada pekerjaan yang berat dan bersinggungan dengan fisik maka wanita pasti tidak diperkenankan untuk mengambil pekerjaan tersebut. Namun faktanya wanita juga memiliki kemampuan untuk mengambil pekerjaan yang secara tidak langsung dicap sebagai “pekerjaan laki” mereka memiliki kecerdasan yang sama dengan pria, kemampuan menyelesaikan masalah seperti pria, dan yang terpenting, wanita memiliki hak yang sama dengan pria.

Beberapa pihak memang seringkali kurang menghargai keberadaan atau hak dari kaum wanita, oleh karena itu timbulnya tuntutan terhadap kesetaraan antara pria dan wanita perlu direspon dan ditindaklanjuti secara baik dan proporsional oleh berbagai pihak. Pentingnya menyikapi isu kesetaraan ini adalah sebagai wujud kepedulian kita terhadap berbagai aktivitas hidup yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat umum, yang juga tugas utama Polri.

Dalam tulisan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, setidaknya ada beberapa poin atau istilah yang melekat dan membentuk citra wanita di masyarakat, yaitu:<sup>1</sup> *Subordinasi*, yaitu penilaian atau pandangan terhadap suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain, ini dapat dilihat ketika perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik dan reproduksi, sedangkan pria dalam urusan publik dan produksi. *Stereotype*, adanya pemberian citra baku atau cap pada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang sesat, pelabelan ini umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali dilakukan untuk membenarkan tindakan sekelompok orang terhadap kelompok lainnya. Sebagai contoh pelabelan negatif pada wanita yang beranggapan bahwa wanita itu cengeng, lemah, suka digoda, tidak bisa mengambil keputusan penting, dan yang paling umum adalah wanita sebagai ibu rumah tangga sedangkan pria adalah pencari nafkah. *Double Burden*, atau peran ganda adalah kondisi di mana beban terhadap pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak dibanding yang lainnya. Walaupun saat ini wanita yang bekerja di luar rumah (sektor publik) sudah cukup banyak, mereka tetap dianggap harus mengerjakan urusan rumah tangga juga, seperti memasak, mencuci, atau membereskan rumah. Hal ini seakan-akan melekat pada diri wanita dan tidak bisa atau tidak wajar jika dikerjakan oleh kaum pria.

Berbagai sektor usaha baik yang kecil maupun yang besar seringkali lebih mengutamakan kelompok pria sebagai pemilik usaha, akibatnya kelompok usaha wanita diarahkan pada sektor-sektor yang lebih feminim, sedangkan bidang lain seperti politik, ekonomi, dan kemasyarakatan, wanita masih jauh tertinggal dari kaum pria. Sampai saat ini kebiasaan memilah dan mengkotak-kotakan pekerjaan masih terjadi, pekerjaan seakan-

---

<sup>1</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Glosary Ketidak Adilan Gender”, dapat diakses dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23>

akan memiliki “gender” tersendiri sehingga pemegang posisinya juga harus dari golongan tertentu.

Topik mengenai kesetaraan gender ini juga dilihat dan terjadi dalam tubuh Polri, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, menyoroti tentang hal ini. Beliau menyayangkan jumlah Polwan yang ada di negara Indonesia, yang saat ini memiliki presentasi sebanyak 5 persen dari total keseluruhan anggota Polri, padahal Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu institusi dengan kekuatan terbesar di dunia setelah China, dengan total sekitar 450.000 anggota aktif di dalamnya, seharusnya dengan jumlah sebesar itu paling tidak kita bisa memiliki anggota Polwan dengan presentase lebih dari 10 persen, seperti yang ada di negara-negara lain.<sup>2</sup>

Peran wanita sebenarnya sudah muncul dalam berbagai bidang, dan telah lama ada. Secara historis keikutsertaan wanita dalam perjuangan menuju kemerdekaan salah satunya bisa dilihat pada perlawanan rakyat di Sumatera Barat, kaum wanita tergabung dalam berbagai organisasi pergerakan rakyat saat itu, seperti Layskar Muslimin, Sabil Muslimat, serta Keputrian Republik Indonesia (KRI), dan beberapa organisasi lainnya. Peran mereka ini terbagi dari barisan terdepan sampai barisan paling belakang yang memiliki peran untuk menyiapkan makanan di dapur.<sup>3</sup> Oleh karena itu akan sangat bijak rasanya jika pemerataan dan kesetaraan gender dapat terwujud, mengingat Polwan secara spesifik merupakan bagian dari Polri yang kedudukannya tidak terpisahkan dari lembaga itu sendiri.

## II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menelaah setiap tulisan, aturan dan penerapannya, serta digabungkan dengan studi kepustakaan atau literatur dengan menganalisis buku, jurnal, paper, media cetak, maupun berita online yang terkait dengan Polwan, juga menelaah secara historiografi. Target data yang dikumpulkan adalah terkait dengan perkembangan Polwan dalam institusi Polri.

## III. PEMBAHASAN

### Kesetaraan Gender

Bicara mengenai peranan wanita, gambaran peran wanita pada awal masa kemerdekaan masih sangat kaku, hal ini terus berlanjut sampai masa transisi menuju era modern. Kehidupan wanita selalu diliputi tradisi-tradisi yang dapat dikatakan terbelakang, hak hidup seorang wanita seakan-akan dibatasi dan dikekang oleh stigma yang entah darimana datangnya, mereka hanya diberikan kuasa dalam kehidupan “dapur, sumur, dan kasur”. Perbedaan masa kolonial dengan masa yang semakin modern juga bisa terlihat pada berkembangnya teknologi dan pendidikan, tentu saja kaum pria tidak pernah dibatasi

---

<sup>2</sup> Diakses dari Tirto, dalam <https://tirto.id/respons-polri-soal-sri-mulyani-yang-menyoroti-jumlah-polwan-glnN> pada Februari 2022

<sup>3</sup> Maryeti, “Peranan Wanita Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Front Timur Kota Padang 1945-1950”, Padang:PD Intisar, 1999, hal. 16-17

untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin, hak wanita yang selalu berbeda dan dibatasi ini lah yang selanjutnya menjadi titik awal perjuangan feminisme di Indonesia pada masa awal era modern.<sup>4</sup>

Perjuangan ini muncul tentu saja oleh karena seorang R.A Kartini, latar belakang beliau yang adalah seorang anak Bupati Jepara membuat ia merasakan pendidikan, saat itu pendidikan adalah hal yang istimewa terutama bagi seorang wanita. Oleh karena sebagai orang yang terpandang dan memiliki pendidikan, cita-cita perjuangan untuk menyetarakan hak-hak perempuan pun melekat dalam diri seorang Kartini, ada beberapa gagasan yang beliau berikan: *pertama*, pendidikan bagi wanita adalah syarat yang paling penting bagi kehidupan, *kedua*, wanita harus diberikan kesempatan dalam menentukan pekerjaan yang cocok bagi dirinya sendiri, *ketiga*, penghapusan poligami, karena dinilai merendahkan martabat wanita.<sup>5</sup>

Selain itu banyak sekali faktor yang memang memiliki pengaruh besar dalam berkembangnya kesetaraan gender, salah satunya lingkungan tempat kita tinggal. Penulis tertarik dengan apa yang ditulis oleh Helen Jarvis tentang bagaimana kota memiliki pengaruh besar terhadap berkembangnya kesetaraan gender.<sup>6</sup> Menurut hemat penulis, kota sangat berpengaruh pada pembangunan sosial dan permasalahan gender. Kesetaraan gender dalam kehidupan berkota sangatlah penting bagi kemajuan dan kehidupan sosial kota. Hal ini bisa dilihat dari pemenuhan batas minimal 30% keterwakilan wanita di legislatif yang masih sulit, dan walaupun pada akhirnya bisa dipenuhi, keterpilihannya masih rendah. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah kota tidak benar-benar memberdayakan sosok wanita di dalam politik. Padahal keterwakilan wanita di dalam politik bisa menjadi cerminan partisipasi politik masyarakat perempuan. Penulis melihat bahwa suatu kota akan ideal apabila kota tersebut mampu mengakomodir kebutuhan warganya, di mana wanita sebagai penghuni kota membutuhkan perlindungan dan fokus dari pemerintah atas permasalahan kekerasan terhadap wanita. Namun perwakilan wanita dalam pemerintahan masih cukup rendah, maka dari itu tidak ada concern dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut dan bisa dikatakan kebutuhan akan hal ini belum bisa terakomodir.

Permasalahan dan kriminalitas yang dialami oleh wanita juga menjadi tolak ukur kegagalan kota dalam mewujudkan kota ramah gender. Dari peningkatan jumlah penduduk Indonesia, ternyata jumlah wanita cenderung lebih besar ketimbang pria dari

---

<sup>4</sup> Triana Wahyudi, "Historisme Perempuan Dalam Sejarah: Formula Kesetaraan Gender di Indonesia Untuk Menyongsong Sustainable Development Goals", *Journal Indonesia History Universitas Negeri Semarang*, 2020, hal.4

<sup>5</sup> Syahrul Amar, "Perjuangan Gender Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Abad XIX", *Jurnal Fajar Historia* vol. 1 no.2, 2017, hal 111

<sup>6</sup> Helen Jarvis, dkk, "*Cities and Gender*", Routledge books, 2009, bagian pertama. Buku ini membahas tentang kota dari perspektif gender. Tulisan ini membantu kita untuk memahami pentingnya kota dalam pembangunan sosial dan spasial gender. Dimana permasalahan ini hanya merupakan satu sisi dari 'segitiga jahat' ras, kelas dan jenis kelamin. Selain itu kota dan gender juga memiliki hubungan yang saling keterkaitan dalam perannya menata kehidupan sosial yang lebih baik. Menurut saya, kota sangat berpengaruh pada pembangunan sosial dan permasalahan gender. Permasalahan dan kriminalitas yang dialami oleh Perempuan juga menjadi tolak ukur kegagalan kota dalam mewujudkan kota ramah gender. Maka dari itu tulisan ini membahas bagaimana kemerdekaan dari permasalahan gender merupakan salah satu tolak ukur dan dapat menentukan kemajuan kota kedepannya.

waktu ke waktu. Dari aspek mobilitas, perempuan memiliki kecenderungan untuk menggunakan dan berpindah-pindah dalam transportasi umum. Jakarta adalah kota yang jauh dari ideal, hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kasus pelecehan dan pemerkosaan terhadap wanita, tidak perlu jauh-jauh, di angkutan umum saja perilaku yang bersifat melecehkan seringkali terjadi, menambah daftar panjang sisi negatif Jakarta. Jakarta dirundung sedemikian banyak tantangan dan persoalan, sejauh ini masih belum menjadikan keamanan terhadap wanita sebagai prioritas utama. Di sini dapat terlihat bagaimana kota Jakarta sudah gagal menjadi kota yang ramah akan keberadaan dan keamanan perempuan. Kesetaraan gender dan perlindungan bagi perempuan adalah hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan perkotaan, hal ini pada akhirnya merujuk pada pembenahan kesetaraan gender dalam bidang segala bidang baik Politik, Sosial, dan Budaya. Maka dari itu untuk mengatasi persoalan kriminalitas terhadap wanita yang ada di masyarakat perlu concern dan partisipasi aktif dari para wanita yang ada di pemerintahan maupun institusi.

### **Sejarah Polisi Wanita (Polwan)**

Seperti yang sebelumnya dijelaskan di atas, bahwa perjuangan kaum wanita telah lama terlihat dan dirasakan baik secara langsung maupun tidak, organisasi wanita yang telah dibentuk di berbagai daerah mulai mendapat perhatian dan dukungan. Seperti yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia bagian Sumatera Barat, melihat organisasi di daerah tersebut memiliki visi yang sesuai dengan Kepolisian, maka muncul lah instruksi untuk mendirikan pendidikan Polwan pada setiap Keresidenan Indonesia, organisasi tersebut adalah organisasi Aisyiyah yang merupakan organisasi wanita dari perserikatan Muhammadiyah.<sup>7</sup>

Selain itu dalam prakteknya di lapangan, aparat penegak hukum memang mendapat kesulitan ketika harus memeriksa korban, tersangka, dan saksi wanita, khususnya dalam pemeriksaan fisik ketika menangani sebuah kasus. Menghadapi permasalahan itu akhirnya anggota Polisi saat itu meminta bantuan dari istri mereka, maupun dari pegawai sipil wanita untuk membantu mereka. Hingga kemudian organisasi wanita yang berasal dari Bukittinggi mengajukan usulan agar wanita diikutsertakan dalam pendidikan Kepolisian. Usulan itu disambut dengan baik dan pada akhirnya cabang djawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera membuka pelatihan pendidikan Polisi Wanita dengan enam orang anggota pertamanya yaitu Maria Saanin, Rosmalina Loekman, Nelly Pauna, Djasmainar, Rosnalia Taher, dan Dahniar Sukotjo yang secara resmi diangkat pada tanggal 1 September 1948.<sup>8</sup>

Selanjutnya, mereka mengikuti pendidikan Polisi bersama dengan 44 orang pria yang saat itu juga mengikuti pendidikan. Sampai pada bulan Desember 1948 terjadi Agresi Militer yang kedua oleh belanda, hal ini membuat Pendidikan Inspektur Polisi yang ada di Bukittinggi tersebut harus terhenti dan akhirnya ditutup. Walaupun sempat tertunda oleh

---

<sup>7</sup> Gusti Asnan, "*Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat tahun 1950an*", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal.44

<sup>8</sup> Pusat Sejarah Polri, dalam [https://museumpolri.org/home/sejarah\\_polwan](https://museumpolri.org/home/sejarah_polwan) diakses pada Maret 2022

karena kejadian tersebut namun pada tahun 1950 ke-enam calon anggota Inspektur Kepolisian Wanita tersebut kembali dilatih, kali ini di SPN Sukabumi dengan berbagai macam bentuk latihan, baik secara fisik (latihan kemiliteran), Anggar, Jiu-jitsu, Judo, serta pendidikan lain yang menyangkut ilmu kemasyarakatan, jiwa, pedagogi, psikologi dan sosiologi.<sup>9</sup>

Sebelum memutuskan untuk memindahkan pendidikan Inspektur Polisi ke Sukabumi, banyak yang harus dihadapi Polri saat terjadi agresi militer Belanda, saat itu mulailah dirasakan peran dari keenam anggota Polwan ini, dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi membuat anggota Polwan saat itu juga mengambil posisi untuk menjaga pemerintahan di sana. Pada saat proses pengosongan daerah di Bukittinggi, para prajurit dari pasukan Belanda mulai mendekat. Inspektur Polisi Amir Machmud langsung mengambil sikap dengan membentuk area pertahanan demi mengawal pengosongan di area tersebut, beliau memimpin satuan Brigade Mobil, dalam pasukan itu tiga dari enam anggota Polwan turut serta melakukan pengamanan. Diakuinya kedaulatan Indonesia oleh pihak Belanda membuat situasi semakin kondusif, dari sana kemudian mereka melanjutkan pendidikan di Sukabumi, dan lulus pada bulan Mei 1951 sebagai Inspektur Polisi.<sup>10</sup> Keenam anggota Polwan inilah kemudian disebut srikandi pelopor lahirnya kesatuan Polisi Wanita di Indonesia, dan tanggal 1 September dijadikan hari kelahiran Polwan di Indonesia, meskipun jumlah mereka masih tergolong lebih sedikit dari Polisi Pria namun peran serta mereka tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan institusi Kepolisian.

Presiden Soekarno menyampaikan pesan serta menunjukkan rasa bangganya terhadap lahirnya Polisi Wanita dalam tubuh Polri, beliau memuji dan mengibaratkan sosok Polisi Wanita seperti bunga, yang ia maksud sebagai Bunga Kartini, pada tahun 1964 Polwan melakukan atraksi dan parade saat upacara Hari Angkatan Bersenjata. Kala itu Presiden Soekarno secara langsung menyapa dan memberikan ucapan selamat kepada anggota Polwan, di samping itu juga beliau memberikan kepercayaan keselamatan istri, anak-anak, dan keluarga terdekatnya pada anggota Polwan. Setelah Soekarno digantikan jabatannya oleh Soeharto, atau dengan kata lain terjadi perubahan dari orde lama menuju orde baru, proses pendidikan calon Polisi Wanita masih berlangsung, namun peminatnya belum terlalu banyak, ditambah saat itu Polri melebur dengan TNI menjadi sebuah instansi yang disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang mana penerimaan taruni dihapuskan, membuat kenaikan jumlah Polwan tersendat dan Polri tidak lagi memiliki lulusan Polwan dari Akademi Kepolisian.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid.,

<sup>10</sup> Awaloeddin Djamin, Achmad Turan, "*Jenderal Polisi RS Soekanto, Bapak Kepolisian Negara Indonesia*", Jakarta: Kerjasama YBB Polri dengan Penerbit Karya Jaya, 2000, hal.115-119

<sup>11</sup> "*Wanita Indonesia Selalu Bergerak dalam Barisan Revolusioner*", (1964) yang dikutip Tirto.id, dalam <https://tirto.id/sejarah-polwan-bermula-dari-6-perempuan-di-masa-perang-cWh1> diakses pada Maret 2022

## Polwan di Era Modern

Jumlah dari Polisi wanita mengalami pasang surut dari masa ke masa, dapat dikatakan pada waktu tertentu jumlah wanita yang ingin menjadi anggota Polri dapat meningkat dengan pesat, namun terkadang, jumlah yang ingin mendaftar dapat mengalami penurunan yang drastis dari yang sebelumnya, dalam catatan yang tertuang dalam buku dari Prof. Satjipto Raharjo, beliau menghimpun data dari Markas Besar Kepolisian RI, pada tahun antara 1990 sampai 1993 jumlah Polisi Wanita mengalami kenaikan dari sebelumnya berjumlah 3 persen dari seluruh anggota, menjadi 9 persen. Secara keseluruhan, jumlah Polwan pada tahun 1992 adalah 5.277 orang dari total pada saat itu sekitar 166.658 personel Polisi di Indonesia. Mayoritas masih berpangkat sersan (Brigadir), lalu 18 orang lainnya berpangkat Kolonel, sedangkan hanya 1 orang yang memiliki bintang di pundaknya sebagai Brigadir Jenderal Polisi.<sup>12</sup>

Saat ini jumlah Polwan memang semakin bertambah, dari data yang terakhir di dapatkan, jumlah Polwan yang saat ini aktif menjadi anggota Kepolisian terdapat sekitar 24.722 selama rentan tahun 2019 sampai dengan 2021 kemarin. Dari total jumlah tersebut dengan 3 orang sebagai Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi, 1.477 personel yang berpangkat sebagai Perwira Menengah (Pamen), lalu sebanyak 3.412 berpangkat Perwira Pertama (Pama), serta 19.830 anggota yang berpangkat Bintara Polri.<sup>13</sup>

Penulis melihat kenaikan dari anggota Polwan masih harus ditingkatkan, berdasarkan data yang dijabarkan di atas, jumlah terhadap anggota Polwan memang mengalami kenaikan sampai hampir dua puluh ribu personel, namun jika ditelaah lebih lanjut, selama lebih dari 30 tahun (sejak 1990) rasanya kenaikan sebesar hampir dua puluh ribu personel itu masih terlalu sedikit. Hal ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor dan perspektif di masyarakat baik secara sempit maupun luas, tugas dan keseharian dari Polisi sangat berat dan kompleks, Polisi memiliki pekerjaan yang multifungsi, yaitu sebagai jaksa dan hakim sekaligus, maksudnya adalah ketika Polisi menentukan untuk menangkap seseorang maka ia harus memiliki keyakinan betul dalam dirinya apakah orang itu benar-benar bersalah atau tidak, yang menjadi masalah adalah jika terjadi sesuatu seperti salah tangkap, bukan resiko hukum maupun kode etik saja yang ia terima, namun tekanan terhadap resiko sosiologis seperti perlawanan yang dapat mengancam nyawanya.<sup>14</sup>

Apa yang menjadi maksud penulis adalah, melihat resiko dan tantangan dalam mengemban tugas Polri maka terdapat stigma yang kemudian melihat bahwa pekerjaan dan tanggung jawab ini adalah bukan untuk kaum wanita, pekerjaan yang banyak bersinggungan dengan fisik dan kejahatan, sangat jauh dari ciri wanita yang dianggap lemah lembut. Selain itu tentu saja banyak anak-anak muda Indonesia yang memiliki keinginan untuk mengabdikan dan melayani negara melalui Institusi Polri, namun mengalami hambatan dengan keinginan orang tua yang tidak merestui putrinya untuk terjun ke dalam

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, "Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan", Jakarta: Kompas, 2007, hal.108-109

<sup>13</sup> Keterangan yang diberikan oleh KabagPenum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan pada November 2021 lalu.

<sup>14</sup> Op.Cit., Satjipto Raharjo, bagian pembuka, hal.24

dunia hukum sebagai penegak hukum itu sendiri, oleh karena kekhawatiran dan merasa itu bukan profesi yang cocok terhadap wanita.

Stigma dalam realitas sosial ini lah yang kemudian perlu untuk dibenahi, bahwa kesetaraan hak pada wanita bukan lah sesuatu yang bisa dianggap remeh, bahkan dalam hal ini sebagai seorang Polisi, wanita memiliki peran yang sangat amat penting. Dalam prakteknya Polisi harus dituntut profesional dan selalu siap dalam menangani gejala apapun yang di masyarakat, serta harus bisa menjadi instansi yang bersifat fleksibel dengan mengikuti perkembangan zaman serta menyesuaikan. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Prof. Chairuddin Ismail, bila dilihat melalui sudut pandang sosiologis, peranan (*role*) akan selalu berkaitan dengan suatu kedudukan (status), maka dalam memahami peranan Polri tidak terlepas dari kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan yang dianut.<sup>15</sup> Apa yang disampaikan oleh Prof. Chairuddin Ismail tepat rasanya jika Polri memberikan perhatian terhadap anggota Polwan, mengingat instansi ini harus bergerak secara dinamis yaitu mengikuti perkembangan zaman dengan baik, dimana kesetaraan terhadap kaum wanita telah dipandang sebagai sesuatu yang penting, dan dapat memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat wanita, selain itu apabila kita mengingat lagi tugas dan sosok Polisi saat ini yaitu “Polisi Sipil” maka keberadaan dari Polwan dapat merefleksikan peranan tersebut,

Pada November 2021 yang lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit membuka acara *International Association of Woman Police (IAWP)* yang ke-58 di Labuan Bajo, Indonesia sebagai Negara Asia pertama yang menjadi tuan rumah dalam acara tersebut sejak tahun 1958, acara tersebut sangat menarik mengingat hal ini menjadi salah satu bukti bahwa kedudukan Polwan memiliki tempat tersendiri bagi Polri. Dalam sambutannya, Kapolri membahas mengenai kesetaraan gender yang memang masih dipengaruhi “*stereotype*” bahwa institusi ini adalah pekerjaan kaum pria. Kapolri mengatakan bahwa institusi Polri memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap Polwan untuk mendapatkan kesetaraan gender. Kapolri juga menjelaskan bahwa Polwan memiliki kepekaan gender yang lebih baik dalam meningkatkan respon terhadap kejahatan berbasis seksual dan gender, membangun kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan legitimasi lembaga penegak hukum. Poin yang menjadi sorotan utama dalam acara tersebut ialah bagaimana Polwan dan Polisi di seluruh dunia memperjuangkan kesetaraan gender.<sup>16</sup>

Polri terus mendukung segala perkembangan dan kemajuan Polwan Indonesia dari segala aspek. Sebelumnya terdapat perbedaan argument terkait pakaian Polwan yang memakai kerudung atau jilbab, tentu hal ini sangat sensitif dan sangat penting untuk menjadi perhatian, dimana anggota Polwan yang beragama Islam ingin untuk lebih tertutup dan menjaga aurat mereka dengan memakai jilbab yang dipadukan dengan seragam Polisi. Melihat adanya hal yang begitu penting tentu saja Polri memberikan kebijakan dan mewadai keinginan tersebut. Sebelumnya pada tahun 2015 lalu, telah

<sup>15</sup> Chairuddin Ismail, “*Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*”, Jakarta: Merlyn press, 2009, hal. 53

<sup>16</sup> Diakses dari Polri.go.id, dalam <https://tribrataneews.polri.go.id/read/14711/39/dibuka-kapolri-iawp-ke58-tahun-di-labuan-bajo-dihadiri-39-negara-1636337493#:~:text=Tribrataneews.polri.go.id,Ibu%20Asuh%20Polwan%20RI%20Ny> , Lihat juga PolresKerinci dalam: <https://polreskerinci.jambi.polri.go.id/berita/detail/bicara-gender-di-iawp-kapolripolwan-di-indonesia-sudah-jadi-jenderal--duduki-posisi-risiko-tinggi> pada Maret 2022



ditanda tangani Surat Keputusan Perubahan dari sebagian Surat Keputusan Kapolri tahun 2005 mengenai pakaian dinas Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Dalam aturan tersebut memang ada bagian yang mengatur tentang penggunaan jilbab, namun kali ini disempurnakan mulai dari jenis, warna, model, dan penggunaan. Bukan hanya sekedar mengatur namun Polri juga menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan penggunaan jilbab oleh Polwan.<sup>17</sup>

Berdasarkan pertimbangan gender, terutama dalam hal ini menjadi seorang Polwan, tidak lagi menjadi hal yang sulit atau tidak mungkin bagi seorang wanita, mereka berhak untuk bekerja di sektor yang selalu di dominasi oleh kaum pria, pekerjaan menjadi seorang Polisi tentu adalah sebuah kebanggaan tersendiri dan menjadi mimpi bagi sebagian orang, oleh karena itu perbedaan gender jangan sampai menghalangi panggilan seseorang untuk melayani dan mengabdikan kepada negara.

#### IV. KESIMPULAN

Kesetaraan Gender dan perlindungan terhadap perempuan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil untuk dibenahi, setiap usaha akhirnya bermuara pada pembenahan kesetaraan gender di segala bidang kehidupan, juga di segala tempat yang mungkin untuk dicapai, baik kota, provinsi, sampai ke tingkat pemerintahan pusat. Negara adalah perwujudan dari demokrasi, maka upaya untuk menyikapi perbedaan wanita dan pria dalam keberhasilan bernegara dan bermasyarakat adalah wujud dari pesta demokrasi itu sendiri. Segala diskusi, ide, dan perjuangan terhadap kesetaraan gender terutama terhadap kaum wanita tidak boleh berhenti, khususnya dalam hal ini terhadap Polwan yang ada di tubuh Polri. Melalui kolaborasi antara Polri dan lembaga-lembaga lain juga harus ditingkatkan karena tugas Polwan dalam mencapai peran Polisi Sipil sangat penting, dan hal itu acapkali terkendala dengan berbagai aspek yakni, profesionalisme, aspek kultural, dan aspek politik, semua upaya itu juga demi memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang masih memiliki stigma maupun pandangan terhadap wanita yang tidak boleh melakukan pekerjaan yang (menurut mereka) berada di sektor pria.

Saat ini memang Polri telah banyak mengakomodir dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan Polwan dalam menangani isu kesetaraan gender, namun hal itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan, kenyataan bahwa jumlah Polwan yang masih cukup timpang dari personel pria menjadi suatu pekerjaan rumah tersendiri bagi institusi Polri, hal ini demi mencapai reformasi Polri yang lebih baik lagi. Selain itu juga mengingat peran Polwan yang cukup penting dalam keberhasilan Polisi Sipil pada masyarakat ada baiknya jika anggota Polwan yang memiliki kecerdasan dan potensi diberikan bekal untuk ikut dalam acara dan pendidikan ke luar negeri untuk melakukan studi banding dan melihat bagaimana fenomena berbasis gender di negara lain, untuk kemudian segala bekal tersebut dapat dipelajari dan menjadi sebuah ilmu baru bukan hanya untuk Polri sendiri juga untuk masyarakat. Terakhir penulis melihat perkembangan dan perjuangan dari berdirinya Polwan merupakan suatu gambaran bahwa negeri kita memiliki banyak kartini muda yang

---

<sup>17</sup> Diakses dari Voa.id, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/mabes-polri-sahkan-aturan-polwan-berhijab/2697838.html> pada Maret 2022

memiliki keinginan untuk mengabdikan pada bangsa dan negara, oleh karena itu Polri diharapkan mampu untuk selalu menjadi wadah dan tempat untuk putra-putri terbaik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asnan, Gusti, 2007, "Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat tahun 1950an", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- Djamin, Awaloeddin, Turan, Achmad, 2000, "Jenderal Polisi RS Soekanto, Bapak Kepolisian Negara Indonesia", Jakarta:Kerjasama YBB Polri dengan Penerbit Karya Jaya
- Ismail, Chairuddin, 2009, "Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri", Jakarta: Merlyn press
- Jarvis, Helen, Cloke, Jonathan, Kantor, Paula, 2009, "Cities and Gender", Routledge books
- Maryeti, 1999, "Peranan Wanita Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Front Timur Kota Padang 1945-1950", Padang:PD Intisar
- Raharjo, Satjipto, 2007, "Membangun Polisi Sipil:Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan",Jakarta:Kompas

### **Jurnal**

- Amar, Syahrul, 2017, "Perjuangan Gender Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Abad XIX", Jurnal Fajar Historia vol. 1 no.2
- Wahyudi, Triana, 2020, "Historisme Perempuan Dalam Sejarah:Formula Kesetaraan Gender di Indonesia Untuk Menyongsong Sustainable Development Goals", Journal Indonesia History Universitas Negeri Semarang

### **Internet**

- Tirto.id, <https://tirto.id/respons-polri-soal-sri-mulyani-yang-menyoroti-jumlah-polwan-gln> diakses pada Februari 2022
- "Wanita Indonesia Selalu Bergerak dalam Barisan Revolusioner", (1964) yang dikutip Tirto.id, dalam <https://tirto.id/sejarah-polwan-bermula-dari-6-perempuan-di-masa-perang-cWh1> diakses pada Maret 2022
- Pusat Sejarah Polri, [https://museumpolri.org/home/sejarah\\_polwan](https://museumpolri.org/home/sejarah_polwan) diakses pada Maret 2022
- Polri.go.id, dalam <https://tribrataneews.polri.go.id/read/14711/39/dibuka-kapolri-iawp-ke58-tahun-di-labuan-bajo-dihadiri-39-negara-1636337493#:~:text=Tribratanews.polri.go.id,Ibu%20Asuh%20Polwan%20RI%20Ny>

PolresKerinci dalam: <https://polreskerinci.jambi.polri.go.id/berita/detail/bicara-gender-di-iawp-kapolripolwan-di-indonesia-sudah-jadi-jenderal--duduki-posisi-risiko-tinggi> pada Maret 2022

Voa.id, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/mabes-polri-sahkan-aturan-polwan-berhijab/2697838.html> pada Maret 2022

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Glosary Ketidak Adilan Gender”, dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23> pada Maret 2022

Humaspolri.go.id, Keterangan yang diberikan oleh KabagPenum Kombes Ahmad Ramadhan pada November 2021

